

PEMERINTAH DAERAH TINGKAT..... DINAS PENDAPATAN DAERAH JL.....Telp.....	SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Masa Pajak : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> </table>						

Nama : _____
 Alamat : _____
 NPWP : _____
 Tanggal jatuh tempo : _____

I. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No. 18 Tahun 1997 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan	Rp.
2. Pajak Yang terhutang	Rp.
3. Kredit Pajak :	
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.
b. Setoran yang dilakukan	Rp.
c. Lain-lain	Rp. _____
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c)	Rp. _____
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2-3d)	Rp. _____
5. Sanksi administrasi :	
a. Bunga (Psl 9(1))	Rp.
b. Kenaikan (Psl 9(5))	Rp. _____
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)	Rp. _____
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c)	Rp. _____

Dengan huruf

PERHATIAN

- Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank.....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) ini.
- Apabila SKPDKB ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

..... Tahun.....
 An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
 Kepala Penetapan

 NIP.

----- *Gunting disini* -----

No.SKPDKB :

TANDA TERIMA

NPWP :
 Nama :
 Alamat :

..... Tahun.....
 Yang Menerima

(.....)

